

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/336892419>

# PENGEMBANGAN MODEL "HYBRID BLENDING FINANCIAL" : UPAYA MENCARI FORMAT IDEAL DALAM MENINGKATKAN PERLUASAN AKSES KUR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

Article · December 2013

CITATION

1

READS

77

3 authors, including:



[Irany Windhyastiti](#)

Universitas Merdeka Malang

27 PUBLICATIONS 162 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Umu Khouroh](#)

Universitas Merdeka Malang

27 PUBLICATIONS 166 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Strategic management [View project](#)



Tourism [View project](#)

# JURNAL Manajemen dan Kewirausahaan

ISSN: 9 772301 909009

Pencitraan Institusional Dalam Perspektif Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Serta Modal Sosial

*Pudjo Sugito*

Pengembangan Model "Hybrid Blending Financial" : Upaya Mencari Format Ideal Dalam Meningkatkan Perluasan Akses Kur Bagi Usaha Mikro Dan Kecil

*Irany Windhyastiti, Christina SR, Umu Khouroh*

Analisis Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Yang Berbasis Pada Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Redesain Pekerjaan Dan Redesain Organisasi (Studi Pada Divisi Munisi Pt. Pindad Turen Malang)

*Nanik Sisharini, Arif Rochman*

The Influence Of Placement On Performance

*Beatrice Antoneta*

Pengaruh *Instore Promotion* Terhadap *Impulsif Buying* Di Swalayan Indomaret Di Kota Ambon

*Thomas Aurina*

Analisis Pengaruh Promotional Mix Terhadap Peningkatan Volume Penjualan

*Abdul Manap Wardoyo*

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Konvensional

*Theresia Pradiani*

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kota Ambon

*Meyland Makalasing*

Dampak Inovasi Layanan Publik Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada SAMSAT Corner di MOG Malang)

*Syarif Hidayatullah*

VOLUME 2  
NOMOR 1  
DESEMBER 2013

JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

# **PENGEMBANGAN MODEL “HYBRID BLENDING FINANCIAL” : UPAYA MENCARI FORMAT IDEAL DALAM MENINGKATKAN PERLUASAN AKSES KUR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Irany Windhyastiti**

**Christina SR**

**Umu Khourah**

Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang

**Abstract:** *Expanding access of business loan is strongly urged to continue to do, given that there is a wide gap between supply and demand of Kredit Usaha Rakyat (KUR).*

*The main objective of this research is to develop a Hybrid Model Blending Financial to search the ideal format of KUR to improve the KUR access expansion for small and micro businesses. The focus of the activities is to : a) identify and analysis the access of funding programs; b) identify the needs and expectations of small and micro businesses about the KUR program ; c) Analysis of the behavior of any relevant actors and stakeholders, motivation, roles and patterns of cooperation and organizing activities; d) identify and analysis of policies and institutions to support the expansion of access KUR . Specific targets to be achieved are : First, the formulation of the Financial Blending Hybrid models design based on the characteristics of programs that already under way, the needs of small businesses to access ideal funding micro and behavior of any relevant actors and stakeholders, motivation, roles and patterns of cooperation and organization activities that have been mapped. Second, socialization, test, and implement Blending Hybrid Financial to search the ideal format to improve access expansion KUR for micro and small businesses. To achieve these objectives, the research method designed by using the method of descriptive research, policy research and applied research.*

*Based on the data, the target KUR 30 % ( in 2012 ) in the agricultural sector can not be achieved . The largest sector of KUR accessing still dominated by the trade sector reached Rp . 65.691 trillion with the amount of 5.79 million borrowers. While the agriculture sector is only 18.9 trillion by the amount of 1.26 million borrowers. This is due, because of the limited range of credit services with the primary locus of priority sectors and before KUR program there are various credit schemes for the agricultural sector with the lower of interest rate .*

*Therefore increasing KUR in the primary sector by applying the concept of Hybrid Blending Financial or a 3 in 1 system Integrated Micro KUR scheme specifically for the agricultural sector, which combines folk with KKPE MOA Micro KUR and skim KUMK SUP 005 that essentially the government to put their money in the bank in order to reduce the interest rate ( cost of fund small ) - blending financing ( guarantee of KUR , cheap funds from KUMK SUP 005 and KKPE interest subsidies) .*

**Key words : KUR, Hiybrid Blending Financial**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam satu dasawarsa terakhir, keberadaan usaha mikro dan kecil semakin menguat dalam kancah ekonomi nasional. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peranan penting, khususnya dalam menyerap lapangan kerja, sehingga sewajarnya kalau sektor usaha ini mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan sehingga menjadi penyangga utama perekonomian nasional.

Sesuai Inpres 1/2010 dan Inpres 3/2010, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan kecil. Inpres 3/2010 mengamanatkan baik kepada bank pelaksana maupun pemda untuk berperan dalam program perluasan KUR terutama disektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industry kecil. Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Meskipun semua pihak mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bagus dan rating Indonesia satu tingkat dibawah *investment grade*; tapi terkait dengan KUR ada dikotomi karena penyaluran KUR belum tertanggulangi dengan baik karena berbagai kendaladalam penyalurannya. Oleh karena itu strategi yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan KUR harus dapat mengidentifikasi dan mengolah kebutuhan usaha mikro, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan ekonomi dapat berjalan jika didukung oleh kebijakan yang memadai melalui rumusan dan penerapan strategi yang dilakukan oleh lembaga terkait yang

tertransformasikan ke dalam kegiatan yang inovatif dan saling mendukung.

Salah satu format pengembangan usaha mikro dan kecil yang mengacu pada Inpres 3/2010 adalah dengan meningkatkan dan memudahkan akses mereka terhadap KUR melalui pembentukan model *Hybrid Blending Financial*. *Hybrid Blending Financial* dapat didudukkan sebagai suatu mediator untuk menggabungkan berbagai mekanisme program yang bersifat relasi keterkaitan, katalistik antar lembaga terkait sehingga tidak tumpang tindih dan saling menghambat antar program. Oleh karena itu agar muncul format akselerasi KUR yang ideal, maka perlu mengenali lebih dalam tipe program-program yang ada, kebutuhan usaha mikro dan kecil dalam mengakses KUR, mekanisme dan kebijakan dari bank pelaksana guna mengefektifkan proses dan tingkat capaiannya.

### **Urgensi atau Keutamaan Penelitian**

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Berdasarkan keberagamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja

maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha dimana 90% diantaranya merupakan usaha mikro. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah feasible namun belum bankable. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan yang dijamin oleh Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat telah berjalan selama 5 tahun, kondisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat menunjukkan perkembangan yang meningkat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2011 secara Akumulasi penyaluran KUR dari November 2007 sampai dengan Desember 2011 mencapai Rp 63,4 trilyun dengan jumlah debitur 5,7 juta UMKM. Jumlah debitur KUR sebanyak 5,7 juta UMKM jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada (10,9%). Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, terdapat 52,18 Juta usaha mikro, 546,68 Ribu usaha kecil, dan 41,33 Ribu usaha menengah pada tahun 2009. Sebagai program dengan *magnitude* yang luas, bersifat massal dan berada di tengah

persaingan yang dinamis, penyaluran KUR kepada pelaku UMKM menghadapi sejumlah kendala, baik di tataran kebijakan maupun di tataran teknis operasional. Oleh karena itu perluasan akses Kredit Usaha Rakyat menjadi *critical point* yang sangat mendesak untuk terus dilakukan, mengingat terdapat kesenjangan yang lebar antara penawaran dan permintaan KUR, dan antara alokasi KUR pada sektor ekonomi satu dan lainnya serta kendala-kendala lainnya yang menghambat.

Dari aspek target capaian disektor sektor hulu yang seharusnya mencapai 25%, untuk tahun 2011 masih didominasi sektor perdagangan 43,4%, sektor pertanian yang merupakan sector hulu hanya mencapai 16,4%, sementara jika sektor hulu terintegrasi yang mencakup perikanan, kelautan, dan industri kecil mencapai realisasi 34,3%. Bahkan untuk tahun 2012 sasaran kepada sektor hulu ditingkatkan menjadi sebesar 30%. Berdasarkan sebaran regional, penyaluran tertinggi KUR masih didominasi usaha yang ada di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 9,8 T (15,5%), Provinsi Jawa Tengah Rp 9,2 T (14,5%) dan Provinsi Jawa Barat Rp 8,3 T (13,1%). Selanjutnya, untuk luar Jawa adalah Provinsi Sulawesi Selatan Rp 3,5 T (5,5%) dan Provinsi Sumatera Utara Rp 3,2 T (5%) sedangkan yang lainnya menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya angka penyaluran KUR di ketiga propinsi, menunjukkan bahwa secara umum penyaluran KUR masih terkonsentrasi di pulau Jawa sedangkan di pulau lain KUR masih kurang terserap secara maksimal. Kondisi ini bisa saja disebabkan oleh faktor sosialisasi yang masih terbatas pada daerah di luar Jawa, sehingga masyarakat tidak banyak mendapat informasi yang jelas tentang program KUR. Pada sisi lain bisa juga disebabkan jumlah penyebaran jaringan kantor cabang Bank Pelaksana

KUR di daerah Luar Jawa jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan penyebaran jumlah kantor cabang Bank Pelaksana KUR pada daerah di pulau Jawa.

Kendala lain yang menghambat dari sisi pelaku usaha adalah : a) ketidaktahuan tentang KUR sehingga mereka cenderung mempunyai persepsi bahwa KUR tingkat bunganya terlalu tinggi dan persyaratannya ruwet dibandingkan dengan kredit yang selama ini mereka akses (misal dari koperasi atau lembaga kredit desa); b) kurangnya sosialisasi KUR yang menyebabkan rendahnya animo masyarakat. Sedangkan dari sisi dinas teknis yang menjadi hambatan utama adalah; a) keterbatasan SDM di Dinas Koperasi dan UMKM b) di beberapa tempat tidak adanya perda pendukung program KUR. Perda pendukung program KUR diperlukan sebagai dasar yang kuat dan dukungan dana operasional untuk bergerak menjalankan program KUR. c) Selain itu kurangnya koordinasi antara dinas teknis dan bank penyalur juga menyebabkan minimnya informasi KUR yang diketahui dinas teknis untuk bisa disalurkan kepada UMKM binaannya.

Kendala yang sangat menghambat perluasan KUR dari sisi perbankan meliputi: a) terbatasnya SDM dan kantor, b) proses dan lamanya waktu klaim jaminan, c) aturan yg mengikat seperti : untuk kur retail adanya ketentuan plafon maksimal 500 jt sehingga bagi yang sudah mempunyai kredit konsumtif hanya boleh mengambil kredit sebesar sisanya saja; d) terbatasnya jangka waktu hanya 3 tahun sehingga beban angsuran terlalu berat bagi nasabah; e) koperasi yg sdh menerima program pemerintah tdk bisa mengambil kur linkage; f) persaingan dari lembaga kredit lainnya (Misal : di

setiap desa di Bali terdapat LPD/ Lembaga Perkreditan Desa dimana masyarakat bisa meminjam dengan dengan persyaratan mudah dan bunga lebih rendah (hanya menunjukkan KTP dan menyediakan jaminan saja langsung bisa cair); g) masih sedikitnya penyaluran KUR pada sektor pertanian karena sifat usahanya yang musiman sehingga bank tidak mau menanggung resiko terlalu besar. Selain itu untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan bunga KUR dianggap terlalu tinggi sehingga harus bersaing dengan program kredit lainnya seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), KUPS dan Revit yang bunganya jauh lebih rendah hanya 6% per tahun.

Kendala-kendala tersebut membawa dampak antara lain : 1) tidak tercapainya target yang ditetapkan untuk beberapa bank pelaksana; 2) target KUR untuk sector hulu tidak mencapai 25% karena disektor hulu juga harus bersaing dengan program departemen/lembaga lain yang menetapkan bunga lebih rendah; 3) tidak meratanya distribusi KUR ke seluruh wilayah Indonesia; 4) rendahnya jumlah UMKM yang mengakses KUR dan akibat lainnya.

Agar akselerasi program KUR dapat berjalan secara efektif dan efisien terutama dalam upaya pengembangan usaha mikro diperlukan sebuah *hybrid blending* program. Asumsi mendasar program ini dikembangkan adalah bahwa program KUR memiliki keterbatasan baik dari pelaku usaha, bank pelaksana maupun pemerintah daerah, juga berbenturan dengan program lain baik dari pemerintah daerah maupun program dari K/L pemerintah pusat. Guna menjamin kesinambungan dan akselerasi program dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil, maka sudah saatnya dibuat program yang langsung memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi. Apabila hal ini

dilakukan dengan baik maka penciptaan lapangan kerja, percepatan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah mimpi yang tak terwujud.

### **Temuan Yang Ditargetkan**

Obyek dari penelitian ini meliputi :  
1) para pelaku usaha mikro dan kecil sebagai acuan dalam menjaring kebutuhan akan model ideal penyaluran KUR,  
2) stakeholder yang terkait sebagai pendukung perluasan akses KUR. Aspek yang akan dikaji yaitu : 1) Identifikasi, dan analisis akses pendanaan dari program-program pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil meliputi efektivitas program-program yang sudah ada dan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program; 2) Identifikasi kebutuhan dan harapan pelaku usaha mikro dan kecil terhadap program KUR; 3) Analisis perilaku setiap pelaku dan stakeholder terkait, motivasi, peran dan pola kerjasamanya serta pengorganisasian kegiatan; 4) Identifikasi dan analisis kebijakan dan dukungan lembaga terkait untuk perluasan akses KUR.

## **METODE DAN DESAIN PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif, *policy research* dan *applied research* guna mengembangkan model *Hybrid Blending Financial* yang ideal dalam meningkatkan akses KUR bagi usaha mikro dan kecil. Unit analisis adalah 1) para pelaku usaha mikro dan kecil sebagai acuan dalam menjaring kebutuhan akan model ideal penyaluran KUR, 2) stakeholder yang terkait seperti pihak perbankan, lembaga penjamin, dinas yang terkait sebagai pendukung perluasan akses KUR di Kabupaten Malang dengan kerangka

sampel berdasarkan *purposive sampling* yaitu para pelaku usaha dari masing-masing sektor penyumbang PDRB .

### **Metode yang digunakan**

Penyusunan prototipe model *Hybrid Blending Financial* sebagai upaya untuk mendapatkan format yang ideal dalam meningkatkan akses KUR bagi usaha mikro dan kecil di Kabupaten Malang adalah dengan melakukan identifikasi dan analisis akses pendanaan dari program-program pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil antara lain meliputi: a) Identifikasi mekanisme dan kebijakan program, efektivitas program-program yang sudah ada dan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program; b) Identifikasi kebutuhan dan harapan pelaku usaha mikro dan kecil terhadap program KUR; c) Analisis perilaku setiap pelaku dan stakeholder terkait, motivasi, peran dan pola kerjasamanya serta pengorganisasian dalam kegiatan KUR; d) Identifikasi dan analisis kebijakan dan dukungan lembaga terkait untuk perluasan akses KUR. Seluruh aspek tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menentukan dan mengembangkan model *Hybrid Blending Financial* yang ideal dalam meningkatkan akses KUR bagi usaha mikro dan kecil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Usaha Kecil Mikro**

#### 1. Tingkat Pendidikan

Dari 30 responden pelaku usaha kecil mikro penerima KUR, sebagian besar berpendidikan SMA yaitu 16 orang (55%). Sedangkan sisanya berpendidikan SMP sebanyak 7 orang (23%), SD sebanyak 4 orang (14%) dan Perguruan Tinggi hanya 3 orang (9%).

2. Jenis Usaha  
Berdasar jenis usaha responden pelaku usaha kecil mikro penerima KUR, sebagian besar bergerak dalam bidang perdagangan yaitu sebesar 15 orang (50%). Sisanya bergerak dalam usaha makanan minuman 12 orang (41%) dan jasa 3 orang (9%).
3. Tingkat Penghasilan  
Dari 30 responden pelaku usaha kecil mikro, sebagian besar yaitu 12 orang (36%) hanya mempunyai penghasilan bersih per bulan rata-rata kurang dari Rp.1 jt. Sedangkan sisanya 8 orang mempunyai penghasilan bersih per bulan Rp. 1jt sd < Rp. 2 jt (27%) , 5 orang mempunyai penghasilan Rp. 3jt sd < Rp. 4 jt (18%), 3 orang mempunyai penghasilan Rp. 2jt sd < Rp.3 jt (9%) dan yang berpenghasilan Rp. 4jt sd < Rp. 5 jt dan lebih dari Rp. 5 jt masing-masing hanya 1 orang.
4. Kondisi Umum Pelaku Usaha Kecil Mikro

Seluruh responden pelaku usaha kecil mikro menyatakan bahwa usaha yang mereka lakukan adalah usaha milik sendiri dan semuanya belum mempunyai status badan hukum. Lama usaha kurang dari 5 tahun dan jumlah tenaga kerja hanya 1 sd 2 orang saja.

#### **Aspek-aspek KUR dari sisi Penerima KUR**

1. Tingkat Bunga  
Berkaitan dengan fasilitas KUR Mikro yang diperoleh oleh seluruh responden, maka jumlah tingkat bunga yang menjadi beban mereka secara keseluruhan sama yaitu sekitar 22% efektif per tahun atau sekitar 13,5% per tahun.
2. Proses Pencairan  
Dalam hal proses pencairan, hanya 11 responden (35%) yang menjawab lebih dari 1 minggu. Sedangkan sebagian besar responden yaitu 19 responden (65%) menjawab maksimal 1 minggu dana pinjaman sudah bisa dicairkan.
3. Persyaratan KUR  
Jika dilihat dari persyaratan KUR, semua responden menjawab tidak ada kesulitan yang berarti. Secara umum persyaratan yang diperlukan adalah KTP, KK dan SKU (Surat Keterangan Usaha).
4. Jaminan  
Jika dilihat dari ketersediaan jaminan, hanya 11 responden (35%) yang menjawab harus menyediakan jaminan berupa bpkb. Sedangkan sebagian besar responden yaitu 19 responden (65%) menjawab tidak memerlukan jaminan.

#### **Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pelaku Usaha Kecil Mikro Terhadap KUR**

Secara umum, dari beberapa saran pelaku usaha kecil mikro dapat diuraikan beberapa kebutuhan dan harapan pelaku usaha kecil mikro terhadap program KUR ke depan yaitu :

1. Dalam hal tingkat bunga ke depan diharapkan bisa ditekan menjadi hanya 1 % per bulan atau 12% per tahun.
2. Jumlah pinjaman lebih diperbesar
3. Tidak perlu menyediakan jaminan bagi KUR Mikro
4. Peringkat prioritas kriteria KUR yang diharapkan pelaku usaha kecil mikro adalah sebagai berikut :
  - a. Potensi usaha
  - b. Kemantapan cashflow usaha
  - c. Memiliki laporan keuangan/catatan usaha yang lengkap
  - d. Memiliki riwayat kredit yang baik
  - e. Kemampuan usaha memajukan produksi dan menyerap tenaga kerja
  - f. Kemampuan menyediakan jaminan
  - g. Memiliki rekening dengan jumlah cukup memadai



## Perkembangan KUR

Perbankan di Jatim mencatat pertumbuhan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada triwulan II/2013. Hingga akhir Triwulan II/2013, jumlah outstanding kredit atau baki debit KUR bank pelaksana di Jatim sebesar Rp 6,49 triliun, meningkat 18,63% dibanding periode yang sama tahun 2012. Sampai dengan pertengahan tahun atau Triwulan II 2013, kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jatim masih konsisten menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan jumlah outstanding kredit KUR dimaksud didorong oleh adanya peningkatan omzet penjualan usaha pada saat tahun ajaran baru dan liburan sekolah yang jatuh pada bulan Juni 2013 (Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Wilayah IV Jatim, Soekowardojo) Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian RI, plafon KUR yang disiapkan oleh bank pelaksana KUR di Jatim hingga periode laporan mencapai Rp 18 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1,54 juta nasabah. Plafon KUR yang disalurkan tersebut tumbuh 47,44% secara year-on-year. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, pada akhir Triwulan II/2013 Jatim masih berada pada urutan kedua secara nasional daerah penyalur KUR dengan plafon tertinggi setelah Jateng. Namun demikian, jumlah plafon KUR yang disalurkan tidak jauh berbeda, yaitu Jateng sebesar Rp 18,35 triliun atau 15,39% dari total plafon, sementara Jatim sebesar Rp 18,01 triliun atau 14,37% dari total plafon (kabarbisnis.com)

Sedangkan secara khusus, di Malang penyaluran KUR meningkat 293,5% selama 3 tahun terakhir dengan NPL hanya 2,89% (kabarjatim.com). Diharapkan penyaluran KUR terus dapat meningkat, karena dari 400 UKM yang ada dibawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Malang baru 156 yang mendapat dana bantuan permodalan (BLU) dari pemerintah Kabupaten Malang.

## Hambatan Penyaluran KUR

Berdasarkan hasil survey responden penerima KUR, secara umum tidak terdapat kesulitan untuk mengakses KUR. Hanya saja dari sudut sektor perbankan, tampaknya masih terdapat kendala untuk menyalurkan KUR. Beberapa hambatan penyaluran KUR diantaranya adalah :

1. Kendala internal dalam pelaksanaan program KUR, yaitu:
  - a) Kurangnya tenaga *Account Officer* (AO) yang menangani KUR (Hanya BRI yang mempunyai tenaga mandtri KUR)
  - b) Kurangnya media tentang produk Kredit Usaha Rakyat (mayoritas tidak terdapat display tentang produk KUR di beberapa lokasi tempat pelayanan transaksi nasabah, dan kecenderungan produk KUR lebih tertutup),
  - c) Keterbatasan jangkauan pelayanan kredit dengan lokus sektor primer prioritas (Sektor primer prioritas berada jauh diluar kota, dan jangkauan terdekat dengan pelayanan perbankan adalah BRI Unit). Kendala eksternal yang mempengaruhi proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :
2. Persepsi yang kurang tepat tentang KUR, misalnya yang berkaitan dengan ketentuan agunan, persyaratan administrasi dan sumber dana KUR,
3. Perubahan kondisi makro ekonomi, seperti inflasi dan kenaikan suku bunga yang menyebabkan menurunnya permintaan kredit serta program kredit lain dari pemerintah yang menggunakan subsidi bunga (seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit PKBL dan lainnya)

**Tabel 1 . Berbagai Skim Kredit Selain KUR**

No	Skim Kredit
1	KKPE-Pengembangan Tanaman Pangan
2	KKPE-Pengadaan Pangan
3	KKPE-Peternakan
4	KKPE –Tebu
5	KKPE- Kelapa Sawit
6	Kredit PEMP & Budidaya Ikan/Rumput Laut
7	KPEN-RP Kemitraan (Kelapa Sawit)
8	KPEN-RP Non Kemitraan (Karet & Kakao)
9	KUMK-SUP

4. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga/instansi yang bekerja dalam Nota Kesepahaman pelaksanaan program KUR.

**Jenis-jenis Skim Kredit untuk UMKM**

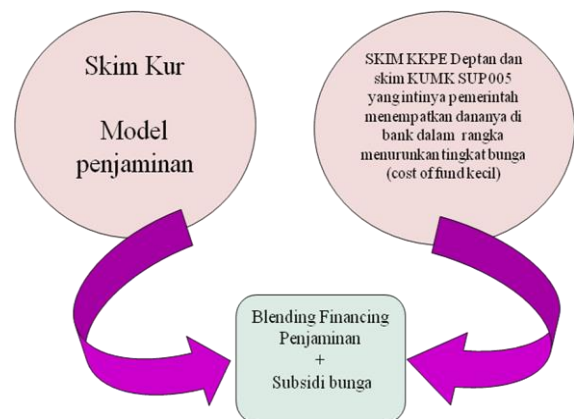
Guna membantu dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, selama ini pemerintah telah banyak memberikan program pemberian kredit dengan berbagai jenis skim yang menjadi pertanggungjawaban berbagai kementerian dan lembaga terkait.

**Model Hybrid Blending Financial**

Berdasar data, target penyaluran KUR 30% (tahun 2012) di sektor pertanian belum dapat tercapai. Sektor terbesar yang mengakses KUR masih didominasi sektor perdagangan yaitu mencapai Rp. 65,691 Trilyun dengan jumlah debitur 5,79 juta. Sedangkan sektor pertanian hanya 18,9 Trilyun dengan jumlah debitur 1,26 juta. Hal ini disebabkan, selain karena keterbatasan jangkauan pelayanan kredit dengan lokus sektor primer prioritas , juga karena sebelum KUR terdapat berbagai

skim kredit untuk sektor pertanian yang lebih rendah tingkat bunganya.

Oleh karena itu meningkatkan penyalur KUR di sektor primer dengan mengaplikasikan Hybrid Blending Financial atau konsep 3 in 1 system berupa Skim KUR Mikro Terpadu khusus untuk sektor pertanian rakyat yakni memadukan KUR Mikro dengan KKPE Deptan dan skim KUMK SUP 005 yang intinya pemerintah menempatkan dananya di bank dalam rangka menurunkan tingkat bunga (cost of fund kecil) – blending financing (penjaminan dari KUR, sumber dana murah dari KUMK SUP 005 dan subsidi bunga KKPE).



**Gambar 1. Model Hybrid Blending Financial**

Mekanisme penerapan model di atas, adalah dengan menggabungkan antara skim KUR dengan model penjaminan dengan skim KKPE Deptan dan skim KUMK SUP 005 yang dilakukan dengan subsidi bunga. Dengan adanya subsidi bunga, maka akan meningkatkan faktor kepastian pendapatan bagi sektor perbankan. Sebagai contoh jika tingkat bunga pinjaman UMKM secara umum ditetapkan 12% per tahun, sedangkan KUR 10% per tahun, maka selisihnya akan menjadi beban pemerintah. Sehingga dengan model ini, diharapkan sektor perbankan tidak ragu-ragu untuk menyalurkan dananya untuk mensukseskan program KUR. Karena selama ini perbankan lebih mengutamakan

program kreditnya sendiri daripada KUR karena dianggap KUR tidak menguntungkan dibandingkan program kredit yang lain. Selain itu model penjaminan KUR dimana dana yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70-80 % dari plafon KUR juga tetap dipertahankan karena penjaminan adalah keunggulan KUR dibandingkan program kredit yang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kebutuhan dan harapan pelaku usaha kecil mikro terhadap program KUR ke depan yaitu :
  - a. Dalam hal tingkat bunga ke depan diharapkan bisa ditekan menjadi hanya 1 % per bulan atau 12% per tahun.
  - b. Jumlah pinjaman lebih diperbesar
  - c. Tidak perlu menyediakan jaminan bagi KUR Mikro
2. Prioritas kriteria KUR yang diharapkan pelaku usaha kecil mikro adalah sebagai berikut : potensi usaha, kemantapan cashflow usaha, memiliki laporan keuangan/catatan usaha yang lengkap dan memiliki riwayat kredit yang baik dan kemampuan usaha memajukan produksi dan menyerap tenaga kerja
3. Sektor penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan dan belum tercapainya target penyerapan KUR di sektor pertanian

### Saran

1. Sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pelaku usaha kecil dan mikro, diharapkan sektor perbankan lebih mempertimbangkan faktor potensi dan cash flow usaha daripada ketersediaan jaminan dalam memberikan kredit KUR.
2. Perlu dipertimbangkan bagaimana meningkatkan penyalur KUR di

sektor pertanian dengan mengaplikasikan Hybrid Blending Financial atau konsep 3 in 1 system berupa Skim KUR Mikro Terpadu khusus untuk sektor pertanian rakyat yakni memadukan KUR Mikro dengan KKPE Deptan dan skim KUMK SUP 005 yang intinya pemerintah menempatkan dananya di bank dalam rangka menurunkan tingkat bunga (*cost of fund* kecil) – blending financing (penjaminan dari KUR, sumber dana murah dari KUMK SUP 005 dan subsidi bunga KKPE).

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Ismawan, 2009, Belantara Keuangan Mikro Indonesia, BASIS No. 03 04 Tahun ke 58 April Bank Indonesia, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, <http://www.bi.go.id>

Bank Dunia, 2006, dalam Making the New Indonesia work for the poor, The World Bank : Washington DC.

Biro Pusat Statistik, 2010, Publikasi Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS : Jakarta ....., 2009, Statistik Indonesia 2009

Damanhuri, Didin S, 2002, Korupsi, Reformasi Birokrasi dan masa Depan Ekonomi Indonesia Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta

Suahasil Nazara, 2007, dalam makalah Pilihan Kebijakan dan Program Yang Realistis dalam Kumpulan Bahan Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan disusun Badan Perencanaan Nasional, BAPPENAS : Jakarta

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya

- UMKM, 2009, Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat, Kementerian Koperasi dan UMK : Jakarta
- EE Chotim EE, Handayani DA, 2003, Lembaga Keuangan Mikro Dalam Wacana dan Fakta : Perlukah Pengaturan ?, AKATIGA Seri Editorial Web page : [www.akatiga.or.id](http://www.akatiga.or.id) Publication
- Bank Indonesia, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, <http://www.bi.go.id>
- Hasan, Winnie, 2009, Seribu Konsultan Bantu Usaha Kecil :Pemerintah Targetkan 20 juta Lapangan Kerja Baru, <http://usaha-umkm.blog.com/tag/peluang-usaha/>
- Kartasasmika Ginanjar, 1997, Kemiskinan, Balai Pustaka ; Jakarta
- Makmum ,2003, Gambar Kemiskinan Dan Action Plan Penanganannya, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 7 No.2 Juni 2003.
- Meyer dan Stamer, 2003, The PACA Book of Concept, [www.mesopartner.com](http://www.mesopartner.com)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Kecil
- .....No. 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKeuangan No. 135/PMK/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Kecil
- .....No. 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKeuangan No. 135/PMK/2008
- Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Kecil Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 pada tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjamin.
- ..... No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- ..... ..No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Prapaningtyas, Paramita, 2001, Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Usaha Kecil Dan Menengah di Indonesia, 7 September 2005, <http://www.pegasus.or.id>
- Retnadi, Djoko, Kredit Usaha Rakyat : Harapan dan Tantangan, Economic Review, No:212, Juni 2008
- Rafinaldy, Needy, 2006, Memetakan Potensi dan Karakteristik UMK Bagi Pertumbuhan Usaha Baru, Jurnal Infokop no 29/ XXII
- Setyobudi, Andang (2007), Peran Serta Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Buletin Hukum Perbankan dan Kebansetralan Volume 5, No. 2 Agustus 2007. Sumodiningrat; Gunawan , 2002, Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, Yogyakarta.
- Supratikno , Hendrawan dkk (1994), Pengembangan Industri Kecil di Indonesia :Pelajaran Analisa Dampak dari Jawa Tengah (Laporan Penelitian), dalam Prisma No. 9 September 1994, LP3ES, Jakarta (Laporan Penelitian).

Sutopo, Wahyudi, 2005, Hubungan Antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil Dalam Pengentasan Kemiskinan , Manajemen Usahawan Indonesia No.01/XXX/ Januari hal 3-12

Tambunan, Tulus, TH (1996), Perekonomian Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia : Jakarta

WJS Poerwadarminta , 1976,, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka : Jakarta

Yunus, Muhammad, 2008, Grameen Bank at a Glance , Grameen Bank : Dhaka